

Judul : Senayan Usulkan Bentuk Satgas Transisi Haji 2026
Tanggal : Jumat, 24 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Biar Kemenhaj Nggak Mulai Dari Awal

Senayan Usulkan Bentuk Satgas Transisi Haji 2026

Transisi penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) kepada Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dinilai rawan menimbulkan masalah di lapangan. Perlu ada antisipasi agar persiapan penyelenggaraan haji 2026 bisa dilakukan secara lebih baik.

ANGGOTA Komisi VIII DPR Haeny Relawati Rini Widyastuti meminta Kemenhaj gerak cepat melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Kemenag. "Agar tahap transisi ini tidak menimbulkan turbulensi yang bisa mengganggu persiapan pelaksanaan haji 2026," ucapnya di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Diketahui, Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan fundamental dalam tata kelola haji. Yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2025. Isinya, memindahkan otoritas penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) kepada Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

Haeny menyebut, ada tiga tantangan krusial yang perlu

diantisipasi selama tahap transisi persiapan dan pelaksanaan Haji 2026. Pertama, tantangan waktu dan tekanan operasional. Kedua, tantangan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Ketiga, tantangan logistik dan alih kelola aset.

Politikus Golkar ini menjelaskan, tantangan waktu dan tekanan operasional terjadi karena waktu persiapan penyelenggaraan haji sangat mepet, yaitu tersisa 6 bulan lagi. Dengan waktu yang relatif singkat, Kemenhaj harus melakukan semua ini secara paralel.

Mulai dari proses tender, pemilihan penyelenggaraan haji, pemesanan akomodasi di Arab Saudi, hingga pengembangan institusi intansi vertikal Kemenhaj sebagai perintah Perpres Nomor 92 tahun 2025. "Semua

harus dilakukan secara paralel dan tepat sasaran," kata Haeny.

Kelambatan sedikit saja, lanjutnya, bisa berimplikasi pada kesiapan penyelenggaraan yang berpotensi mempengaruhi kualitas layanan 221.000 jemaah haji. Tantangan kedua terkait kelembagaan dan SDM. Hal ini karena tugas Kemenhaj untuk membangun struktur birokrasi baru dari nol.

Haeny bilang, hal ini bukan sesuatu yang mudah. Sebab Kemenhaj perlu merekrut dan melatih SDM haji yang kompeten, berintegritas dan profesional yang ada di 13 embarkasi haji dan 7 debarkasi. "Juga perlu ada alih pengetahuan dari Kemenag ke Kemenhaj dalam proses tata kelola haji," tandas mantan Bupati Tuban, Jatim ini.

Kemenag, lanjutnya, memiliki pengalaman puluhan tahun dalam urusan tata kelola haji. Sehingga perlu ada transfer pengetahuan dan pengalaman secara lebih terstruktur. Bila tanpa ada mekanisme transfer pengetahuan yang jelas, maka pengalaman

Kemenag yang sudah bertahun-tahun akan hilang begitu saja. "Jadi Kemenhaj harus memulai dari awal," imbuhnya.

Ketiga, tantangan terkait logistik dan alih kelola aset. Dalam tahap transisi ini akan ada pengalihan aset haji seperti embarkasi, debarkasi, asrama haji, Rumah Sakit Haji (RSH) dan fasilitas pendukung lainnya di berbagai daerah dari Kemenag ke Kemenhaj. "Hal ini memerlukan proses inventarisasi, verifikasi, dan serah terima yang cukup rumit," jelasnya.

Untuk mengatasi ketiga tantangan itu, Haeny menyarankan tiga solusi strategis. Yaitu pendekatan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, perlu ada Satgas Transisi Haji 2026. Personelnya melibatkan gabungan dari Kemenag dan Kemenhaj.

Selain itu, kata Haeny, mekanisme perpindahan sementara pegawai Kemenag yang berpengalaman ke Kemenhaj untuk menjaga kontinuitas operasional. Caranya, Kemenhaj

mempertahankan kerja sama dengan Petugas Penyelenggara Haji dan vendor yang terbukti teruji pada tahun-tahun sebelumnya. "Ini untuk menghindari risiko ketidaksiapan penyedia layanan baru" tegas Haeny.

Untuk jangka menengah, Kemenhaj harus fokus pada konsolidasi kelembagaan. Caranya, dengan melakukan percepatan rekrutmen SDM inti dan menyelenggarakan program pelatihan intensif yang bekerja sama dengan Kemenag dan lembaga pelatihan Pemerintah.

Sedangkan untuk jangka panjang, Kemenhaj harus membangun sistem tata kelola haji yang modern, terdigitalisasi, dan berorientasi pada kualitas serta transparansi pelayanan. Sehingga pengembangan single data base terpadu untuk seluruh jemaah haji dan umrah adalah suatu keharusan. "Kemenhaj juga perlu merancang model bisnis yang inovatif untuk mengoptimalkan pengelolaan aset-asetnya," saran legislator asal Jawa Timur (Jatim) ini. ■ TIF